



**PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018**



**SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI**

Jln. Pangeran Diponegoro No. 02 Kuala Kurun (74511) – Kalimantan Tengah

Telp. / Fax (0537) ~ 3032797

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Pengertian Indikator Kinerja .....</b>	<b>2</b>
<b>B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Klarifikasi Tujuan/Sasaran yang Ingin dicapai .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Menyusun Daftar Awal IKU .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Penilaian dan Pemilihan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III. PENUTUP .....</b>	<b>6</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya berkat Rahmat dan Karunia dan penyertaan-NYA sehingga dapat ditetapkannya Dokumen Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017, sudut pandang strategi pencapaian kinerja, kami sadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut sangat kami harapkan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang telah bersusah payah membantu kami dalam menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Gunung Mas dan Perangkat Daerah yang diterapkan di dalam Perjanjian Kinerja baik Perangkat Daerah maupun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang nantinya akan menyampaikan hasil *Key Performance* yang telah direalisasikan oleh Instansinya masing-masing dan kami mengharapkan agar senantiasa meningkatkan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel, sehingga terwujud Pemerintahan yang baik semoga bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat berguna bagi kita semua.

Kuala Kurun, September 2017

BUPATI GUNUNG MAS,

**ARTON S. DOHONG**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam kerangka pembangunan Good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti yang dilakukan selama ini, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan untuk menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian, ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **A. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

*"Indikator"* adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberikan petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. *"Indikator kinerja"* adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa

indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksanaannya.

## **B. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. **Relevan** (indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur).
2. **Penting** (menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian).
3. **Efektif dan layak** (data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak).

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan
4. Menggambarkan sesuatu yang diukur
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur

## **BAB II**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam proses penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 dilakukan proses revisi terhadap Renstra – RPJMD melalui proses penyaringan yang berulang-ulang, kerjasama, dan pengembangan konsensus serta pemikiran yang hati-hati.

Dalam proses penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan tahap-tahap untuk penyusunan IKU untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan sebanyak **7 ( Tujuh ) Misi, 37 (Tiga puluh tujuh) sasaran strategis** , dan **55 (Lima Puluh lima) Sasaran strategis** Indikator Kinerja utama

#### **1. Klarifikasi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai**

Pada tahapan ini dilakukan sinkronisasi indikator kinerja utama, adalah pernyataan hasil, atau tujuan atau sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dengan mengacu pada RPJMD lima tahun (2014 - 2019) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi instansi serta Rencana Strategis (Renstra), arah kebijakan umum dan strategi maka di dapatkan sasaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan urusan wajib yang ditangani

## **2. Menyusun Daftar IKU Yang Mungkin Dapat Digunakan**

Terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat digunakan dengan tepat. Daftar awal indikator kinerja ini disusun setelah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan informasi kinerja dan kewajiban-kewajiban pelaporan akuntabilitas, dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan di dalam kerangka kerja penyusunan indikator kinerja di atas. Berikut daftar IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran

## **3. Penilaian dan Pemilihan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pada tahap dilakukan evaluasi terhadap semua Indikator yang tercantum pada daftar awal Indikator Kinerja Utama (IKU). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan setiap Indikator Kinerja dalam daftar dengan kriterianya. Dengan penggunaan Skala maka didapatkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Demikianlah penentuan Indikator Kinerja Utama ini dilakukan sehingga dihasilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan RPJMD 2017-2018 Terlampir Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagai berikut :



### **BAB III**

### **P E N U T U P**

Kerangka kerja penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan keseluruhan pola tindak mulai dari identifikasi dan pengumpulan sejumlah indikator pada daftar awal (list) yang diusulkan sampai pada penilaian, seleksi, pemilihan, penentuan pemilihan, penetapan resmi dan pengorganisasian penerapannya. Kerangka kerja ini merupakan inti agar dapat dihasilkan indikator-indikator yang baik dalam proses ini.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan IKU mengacu kepada revisi RPJMD Tahun 2017-2018 serta dengan mempertimbangkan bidang kewenangan, tugas pokok, dan fungsi instansi serta sasaran dan rencana strategis Pada Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan telah menginventarisir dan menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini diharapkan dapat semakin membawa Pemerintahan semakin dekat dengan capaian untuk mencapai Good Government dan Result Oriented Government.